

RESOLUSI DEWAN EKSEKUTIF TENTANG PENDAFTARAN HUKUM IAWP DI MAURITIUS

Pembukaan

Aliansi Internasional Pemulung (IAWP), sebuah federasi serikat pekerja global yang mewakili pemulung dan organisasi mereka di berbagai negara, berkomitmen untuk memperkuat struktur kelembagaannya guna memajukan hak, pengakuan, dan mata pencaharian pemulung secara efektif di seluruh dunia.

Menyadari perlunya identitas hukum formal untuk meningkatkan tata kelola, manajemen keuangan, advokasi global, dan kemitraan, Dewan Eksekutif telah melakukan proses untuk mengidentifikasi yurisdiksi yang tepat untuk pendirian hukum IAWP.

Dewan Eksekutif mengakui kajian hukum komprehensif yang dilakukan oleh Suri & Sudhir Consultancy, sebagaimana disajikan dalam laporan berjudul "*Penggabungan Resmi Aliansi Internasional Pemulung Sampah (IAWP) – Tinjauan Yurisdiksi dan Rekomendasi*," yang mengevaluasi yurisdiksi potensial termasuk Chili, Kanada, Kenya, dan Mauritius.

Dewan Eksekutif selanjutnya mencatat kajian hukum komparatif yang dilakukan oleh HomeNet International, yang meninjau kerangka hukum dan persyaratan di berbagai yurisdiksi, termasuk India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Kamboja, Chili, Indonesia, Kenya, Sri Lanka, Malaysia, Mauritius, Belanda, Afrika Selatan, Singapura, Swiss, Inggris Raya, Amerika Serikat, Laos, Maladewa, Nikaragua, Pakistan, Filipina, Tanzania, dan Thailand.

Analisis-analisis ini secara kolektif menyoroti Mauritius sebagai yurisdiksi yang menawarkan kemudahan pendaftaran yang relatif, persyaratan kepatuhan yang menguntungkan, efisiensi administratif, dan kesesuaian untuk organisasi berbasis keanggotaan internasional seperti IAWP.

Resolusi

Oleh karena itu, Dewan Eksekutif Aliansi Internasional Pemulung dengan ini memutuskan bahwa:

1. Mandat Pendaftaran

Dewan Eksekutif memberi mandat kepada Pengurus IAWP untuk melanjutkan pendaftaran dan pendirian organisasi secara hukum di Mauritius.

2. Lingkup Wewenang

Para Pengurus dan Sekretaris Jenderal berwenang untuk:

- o Melaksanakan semua prosedur hukum, administratif, dan keuangan yang diperlukan untuk pendaftaran di Mauritius;
- o Manfaatkan layanan hukum dan profesional yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendirian perusahaan;
- o Selesaikan dan serahkan semua dokumen hukum, termasuk anggaran dasar/peraturan internal yang selaras dengan kerangka tata kelola IAWP;
- o Pastikan Anda mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Mauritius.

3. Keselarasan Tata Kelola

Proses pendaftaran harus memastikan bahwa:

- o Struktur tata kelola IAWP yang demokratis dan dipimpin oleh pekerja tetap dipertahankan;
- o Ketentuan konstitusional yang diadopsi oleh Kongres dan kebijakan terkait yang disetujui oleh Dewan Eksekutif tercermin dalam badan hukum tersebut.
- o Mekanisme untuk akuntabilitas, transparansi, dan representasi afiliasi ditegakkan.

4. Implikasi Keuangan dan Operasional

Para Pengurus berkewajiban:

- o Alokasikan sumber daya yang diperlukan dalam anggaran yang telah disetujui untuk pendaftaran dan biaya terkait;
- o Laporkan setiap implikasi keuangan yang signifikan kepada Subkomite Keuangan dan Dewan Eksekutif;
- o Pastikan bahwa pendaftaran tersebut memperkuat kemampuan IAWP untuk menerima dan mengelola dana sesuai dengan misinya.

5. **Pelaporan dan Pengawasan**

Para Pengurus dan Sekretaris Jenderal wajib memberikan laporan berkala kepada Dewan Eksekutif mengenai:

- o Kemajuan proses pendaftaran;
- o Keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses pendirian perusahaan;
- o Segala tantangan atau risiko yang dihadapi.